

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (LegisPrudence)*, Ed. Pertama, Ctk. Kelima, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Damanik, Ahmad Taufan, 2010, *Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam Ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI), Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Ctk. Ketiga, Nusa Media, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1973, *Hukum Agraria Antar Golongan*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1973, *Masalah Agraria (Berikut Peraturan-Peraturan Dan Contoh-Contoh)*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Ed. Revisi, Ctk. 12, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Ed. Revisi, Ctk. Keempat, Universitas Trisakti, Jakarta.
- HS., Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- HS., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Ctk. Kelima, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2014, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Kolopaking, Anita D.A., 2013, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*, Ed. Pertama, Ctk. Pertama, P.T. Alumni, Bandung.
- Manan, Bagir, 2009, *Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Kelima, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Kedelapan, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Ed. Ketiga, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Ctk. Keduapuluh satu, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ND., Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk. IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P., 1984, *Serba-Serbi Hukum Agraria*, PT. Alumni, Bandung.
- Roestamy, Martin, 2011, *Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Property Bagi Asing (Dihubungkan Dengan Hukum Pertanahan)*, PT. Alumni, Bandung.
- Ruchiyat, Eddy, 2006, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Ctk. Ketiga, PT. Alumni, Bandung.
- Santoso, Urip, 2013, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, ctk. Ketiga, Ed. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Ctk. Pertama, Remadja Karya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UI Press, Jakarta.

- Soesangobeng, Herman, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Jilid I, STPN Press, Yogyakarta.
- Sudiyat, Iman, 2012, *Hukum Adat Sketsa Asas*, ctk. Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.
- Suherman, Ade Maman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sumarja, FX., 2015, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing: Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Ctk. 1, Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*, Kompas, Jakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Syahrani, Ridwan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

## **B. Jurnal/Tesis/Makalah**

- Asshiddiqie, Jimly, “Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia”, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Budiarto, Muhammad Taufik, “Sudut Pandang Perpajakan Atas Pengalihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan Mekanisme Perjanjian *Nominee*”, *SNKN*, Simposium Nasional Keuangan Negara, 2018. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/download/260/132/&ved>., diakses tanggal 3 November 2019.
- Harismayana, Agus Aditya, “Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Oleh Orang Asing Dengan Meminjam Nama Warga Negara Indonesia Melalui Akta Pengakuan Hutang Notariil Di Denpasar”, *Tesis*, Program Studi Pascasarjana (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010.

- Khunaifi, “Melindungi Kedaulatan Tanah Indonesia Dari Penguasaan Orang Asing: Tinjauan Atas Putusan Praperadilan Nomor 07/PID.Prap/2015/PN Dps”, *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 5, 1 April 2016.
- Octavianus, Eka, *et.al.*, “Penyelundupan Hukum Oleh Orang Asing Dalam Upaya Penguasaan Hak Atas Tanah (*Legal Offence Conducted by Foreigners in The Effort to Gain Right of Land Ownership*)”, *Jurnal, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar*, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/691352a6389e0877ffe5a6adea2c6bef.pdf>., diakses tanggal 3 November 2019.
- Ratnayanti, Ida Ayu Putu, “Perjanjian Penguasaan Tanah Hak Milik Antara Warga Negara Asing Dan Warga Negara Indonesia Secara Notariil Sebagai Suatu Bentuk Penyelundupan Hukum”, *Tesis, Program Studi Pascasarjana (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2012.
- Sumardika, I Nyoman, “Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Kabupaten Badung”, *Tesis, Program Studi Pascasarjana (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2007.
- Wijayanta, Tata, dkk., “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”, *Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2009.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3632.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5793.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1442.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pertanahan.

#### **D. Putusan-Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 238/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 19 September 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 24 Oktober 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt.Plw/2012/PN.Dps., tanggal 2 September 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 796/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 17 Oktober 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/PDT.G/2013/PN.DPS. tanggal 6 Maret 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.Dps., tanggal 18 Maret 2014.

- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS., tanggal 18 Juni 2015.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 31/PDT/2007/PT.DPS. tanggal 13 Juni 2007.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 54/PDT/2013/PT.DPS. tanggal 9 Juli 2013.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 12/PDT/2014/PT.DPS. tanggal 23 April 2014.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 64/PDT/2014/PT.DPS., tanggal 22 Juli 2014.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 98/PDT/2014/PT DPS., tanggal 23 September 2014.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 193/PDT/2015/PT.DPS., tanggal 4 Februari 2016.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/Pdt/2008 tanggal 10 September 2009.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1540 K/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3020 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3200 K/Pdt/2014 tanggal 9 Juni 2015.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1995 K/Pdt/2015, tanggal 25 November 2015.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3403 K/Pdt/2016, tanggal 8 Februari 2017.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 PK/Pdt/2011, tanggal 30 September 2011.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50 PK/Pdt/2016 tanggal 21 September 2016.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 PK/Pdt/2017, tanggal 18 Desember 2017.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 PK/Pdt/2018 tanggal 25 April 2018.

#### **E. Internet**

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Penyelundupan>, diakses tanggal 13 September 2019, pukul 12:48 Waktu Indonesia Barat.

<http://kompas.com/nasional/read/2015/03/08/16300151/Pemerintah.Akan.Alihkan.Tanah.Milik.Orang.Asing>, diakses tanggal 13 November 2019, pukul 02:09 Waktu Indonesia Barat.

<https://wartakota.tribunnews.com/amp/2018/08/03/hotman-paris-janjikan-rp-1-triliun-apabila-ditunjuk-jadi-dirjen-pajak-oleh-presiden-jokowi&ved>., diakses tanggal 3 November 2019, pukul 01:15 Waktu Indonesia Barat.

Sumerta, Dewa Putu, “Negara Rugi, 50 Ribu WNA Kuasai Tanah Di Bali”, <https://nasional.inilah.com/read/detail/2190114/negara-rugi-50-ribu-wna-kuasai-tanah-di-bali>, diakses tanggal 8 Maret 2019, pukul 13:15 Waktu Indonesia Barat.